



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA**  
**DAN CIPTA KARYA**

Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telp.024-7608368  
Faksimile 024-7613181 Laman <http://dpubinmarcipka.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [dpubinmarcipka@jatengprov.go.id](mailto:dpubinmarcipka@jatengprov.go.id)

Tempat, 1 Februari 2025

Nomor : 400.3.10.8/26  
Sifat : Biasa  
Lampiran :  
Hal : Undangan

Yth. Sebagaimana Terlampir di  
Tempat

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah bermaksud mengadakan acara Peningkatan Pelayanan PPID dan Keterbukaan Informasi Publik guna Mempertahankan Badan Publik yang Informatif serta Pengujian Konsekuensi informasi yang dikecualikan, untuk itu mengharap kehadiran Bapak/Ibu, pada :

Hari : Kamis - Jumat Tanggal  
: 06 - 07 Februari 2025  
Waktu : 13.00 WIB – selesai (terlampir)  
Tempat : Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta  
Jl. Walter Monginsidi No.74, Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa  
Tengah 57134

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas PU Bina Marga Dan Cipta  
Karya Provinsi Jawa Tengah,



Dr. Ir. AR Hanung Triyono, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP.196611291992031005

Tembusan :

1. Sekretaris Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya

Kepada Yth :

1. Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan;
2. Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur;
3. Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat;
4. Kepala Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung;
5. Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal;
6. Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan;
7. Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap;
8. Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang;
9. Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang;
10. Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo;
11. Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati;
12. Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi;
13. Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta;
14. Kepala Balai Pengujian dan Peralatan;
15. Kepala Balai Jasa Konstruksi;
16. Seluruh Tim Pengelola Informasi Dan Dokumentasi.

## SUSUNAN ACARA

WAKTU	ACARA	KETERANGAN
<b>Kamis, 06 Februari 2025</b>		
13.00-13.30	Registrasi	Panitia
13.30-14.00	Pembukaan MC	Panitia
	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Panitia
	Sambutan dan Pembukaan	Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng
	Pembacaan Doa	Panitia
14.00-14.30	Paparan Kelembagaan PPID Pelaksana	PPID Pelaksana Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng
14.30-16.30	Peningkatan Pelayanan PPID dan Keterbukaan Informasi Publik guna Mempertahankan Badan Publik yang Informatif	Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
16.30-17.00	Diskusi	Moderator
17.00	Penutup	Panitia
<b>Jumat, 07 Februari 2025</b>		
07.30-08.15	Registrasi	Panitia
08.15-08.45	Pembukaan MC	Panitia
	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Panitia
	Sambutan dan Pembukaan	Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng
	Pembacaan Doa	Panitia
08.45-09.00	Penyampaian Informasi yang Dikecualikan PPID Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	PPID Pelaksana
09.00-11.00	Pengujian Informasi yang Dikecualikan PPID Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Narasumber : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jateng;</li> <li>2. Biro Administrasi Pengadaan Barang/jasa;</li> <li>3. Biro Hukum Setda Prov. Jateng;</li> <li>4. Komisi Informasi Prov. Jateng;</li> <li>5. UNS Surakarta;</li> <li>6. GAPENSI Jateng;</li> <li>7. INKINDO Jateng.</li> </ol>
11.00-11.15	Penandatanganan Lembar Uji Konsekuensi	<i>Badan Siber dan Sandi Negara</i>

11.15	Penutup	Panitia
-------	---------	---------

**DOKUMENTASI PENETAPAN DIP DAN DIK  
TAHUN 2025**



## DAFTAR HADIR

HARI, TANGGAL : Jum'at, 7 Februari 2025  
 PUKUL : 07.30 WIB s.d. selesai  
 TEMPAT : RUANG RAPAT BPJ WILAYAH SURAKARTA  
 ACARA : Evaluasi dan Uji Konsekuensi Informasi PPID

NO.	NAMA	JABATAN / INSTANSI	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN	
			L	P		
1.	ALI HUDA	SEKUDIN	✓		1.	
2.	AGUS A.	Belia TMV	✓			2.
3.	IWAN BUDIANTO	KABID RBP	✓		3.	
4.	Braman	BRI Pnd				4.
5.	Supriyomo	JFT			5.	
6.	Gandy	Kompus				6.
7.	Paradise A	Bid. Barat		✓	7.	
8.	Gandhy k	1 comito	✓			8.
9.	Mas hus	Kompus			9.	
10.	Doy ulita	UMS	✓			10.
11.	Mulyom	Giro Huk			11.	
12.	TOMASANA	INIKINDO	✓			12.
13.	ILMI mufilanasari			✓	13.	
14.	Vannesa Poppy D	Bid. Barat		✓		14.
15.	Rusti	Apog			15.	
16.	Widr Sasongko	Umpeg	✓			16.
17.	Deddy .A	Umpeg	✓		17.	
18.	Hasmi Panjr .W	Bidang Barat	✓			18.
19.	Fajar Wafianto	@deputi cu/ateas	✓		19.	
20.	Uek	Bid H				20.

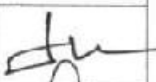
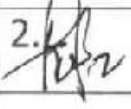

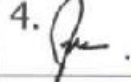

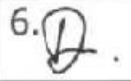


## DAFTAR HADIR

HARI, TANGGAL : Jum'at, 7 Februari 2025  
 PUKUL : 07.30 WIB s.d. selesai  
 TEMPAT : RUANG RAPAT BPJ WILAYAH SURAKARTA  
 ACARA : Evaluasi dan Uji Konsekuensi Informasi PPID

NO.	NAMA	JABATAN / INSTANSI	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN	
			L	P		
1.					1.	
2.	Heningratu	Subbag Program	L			2.
3.	Dhaniswara	— a —	L		3.	
4.	Ari M	— a —	L			4.
5.	Anya Budhi . S	— x —	L		5.	
6.	PENY PATRICK	— c —	L			6.
7.	Seliani H	SPPBG	P		7.	
8.	Nuur Fita Y	SPPBG	P			8.
9.	HERU CHANDRA	SPPBG	L		9.	
10.	Devi Nur	SPPBG	P			10.
11.	Hendryawan Odey	UP	L		11.	
12.	Nur Atika	Brd. timur	P			12.
13.	Nesta Azar	RB	L		13.	
14.	Adji. Aditya	umpes	L			14.
15.	Fandi.	Capres	L		15.	
16.	Hartanto .	— k —				16.
17.	Asteria D. j	SiE RB	P		17.	
18.	Sri Sutrisni	— m —	P			18.
19.	Brian A	— n —	L		19.	
20.	Rizal	— o —	L			20.

## DAFTAR HADIR

HARI, TANGGAL : Jum'at, 7 Februari 2025  
 PUKUL : 07.30 WIB s.d. selesai  
 TEMPAT : RUANG RAPAT BPJ WILAYAH SURAKARTA  
 ACARA : Evaluasi dan Uji Konsekuensi Informasi PPID

NO.	NAMA	JABATAN / INSTANSI	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN	
			L	P		
1.	Teguh P	Bpj clp	L		1.	
2.	Kukuh	Capensi jtk				2. 
3.	Gapriyung	Capensi.			3.	
4.	Damin kubi	Capensi				4. 
5.	DEVVA Puji s	Bpj wsb	L		5.	
6.	TEGUH DWI	Bpj Tegah	L			6. 
7.	Api D.	Bpj pati	L.		7.	
8.	Hutma Uli tua.	Ka. kabin Jaban	P			8. 
9.					9.	
10.						10.
11.					11.	
12.						12.
13.					13.	
14.						14.
15.					15.	
16.						16.
17.					17.	
18.						18.
19.					19.	
20.						20.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA**  
**DAN CIPTA KARYA**

Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telp.024-7608368  
Faksimile 024-7613181 Laman <http://dpubinmarcipka.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [dpubinmarcipka@jatengprov.go.id](mailto:dpubinmarcipka@jatengprov.go.id)

**NOTULENSI**

**PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

Hari/ Tanggal : Jumat / 07 Februari 2025  
Tempat : Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta Jl. Walter Monginsidi No.74,  
Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57134  
Waktu : 08.00 – selesai (terlampir)  
Acara : Pengujian Konsekuensi informasi yang dikecualikan  
Pimpinan Rapat : Bapak Sekretaris Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya  
Provinsi Jawa Tengah  
Narasumber : Komisi Informasi Prov. Jateng, Dinas Kominfo Prov. Jateng, Biro Hukum Prov.  
Jateng, Bior APBJ Prov. Jateng, Gapensi BPD Jawa Tengah, Ikatan Nasional  
Konsultan Indonesia, Universitas Sebelas Maret Surakarta  
Peserta : 43 Orang (anggota Tim Pengelola Informasi Dan Dokumentasi)

**I. Hasil Pembahasan :**

1. Usulan jenis informasi yang diKecualikan dari Badan Publik sebanyak 13 poin dengan rincian sebagai berikut :
  - a. 2 poin Daftar Informasi Dikecualikan yang sudah ditetapkan sebelumnya pada Tahun 2024 oleh Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
  - b. 11 poin Daftar Informasi Dikecualikan usulan baru.
2. Dari Daftar Informasi diKecualikan yang diusulkan berdasarkan alasan dan pertimbangan serta kesesuaian pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada prinsipnya dapat diterima, namun perlu disesuaikan kembali sebagai berikut :
  - a. Perlu didetailkan kembali alasan informasi dapat dibuka atau ditutup serta jangka waktu pengecualiannya;
  - b. Daftar Informasi yang diKecualikan yang ditetapkan Badan Publik harus disesuaikan dengan Kewenangan dan Tupoksi dari Badan Publik sendiri;
  - c. Jenis informasi yang masih dalam kelompok informasi yang sama dapat disatukan;
  - d. Periode Jangka waktu Daftar Informasi yang diKecualikan tidak ada yang permanen dan harus terukur.
3. Daftar Informasi yang diKecualikan yang disesuaikan dengan hasil pembahasan disusun sesuai dengan format Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Publik dan selanjutnya disahkan dengan Keputusan Kepala Badan Publik;
4. Daftar Informasi yang diKecualikan hasil pembahasan sebagaimana terlampir.

3

No	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Hasil Pengujian	Kewenangan OPD	Keterangan
1	Lokasi Trace Jalan, Jembatan dan Gedung yang akan dibebaskan	Berdasarkan alasan dan pertimbangan serta penetapan DIK tahun 2024 pada prinsipnya dapat diterima	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	DIK Tahun 2024
2	Perencanaan teknis jalan/jembatan/bangunan gedung negara	<p>Jangka waktu pengecualian</p> <p><b>Semula :</b> Sampai dengan penunjukan pemenang lelang oleh PPK</p> <p><b>Semula :</b> 10 Tahun setelah Final Hand Over (FHO), hanya dibuka berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.</p>	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	DIK Tahun 2024
3	Nomor rekening pegawai yang tercantum dalam daftar gaji pegawai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis informasi yang masih dalam kelompok informasi yang sama dapat disatukan;</li> <li>- Disatukan dengan no 12 <b>Dokumen/berkas Kepegawaian ASN;</b></li> <li>- <b>Nomor rekening pegawai yang tercantum dalam daftar gaji pegawai</b> merupakan kewenangan <b>Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;</b></li> <li>- <b>Dihapus</b> dari daftar informasi dikecualikan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya.</li> </ul>	<b>Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah</b>	Usulan Baru Tahun 2025
4	<p>Dokumen Pengadaan Tanah mengandung Informasi yang Dikecualikan, sepanjang mengenai:</p> <p>a. Data kepemilikan tanah;</p> <p>b. Nilai ganti kerugian yang diterima atas Tanah, Ruang dan bawah tanah, Bangunan, Tanaman serta benda yang berkaitan dengan tanah;</p>	<p>- Jangka waktu pengecualian <b>semula</b> Dikecualikan sampai laporan pekerjaan selesai diaudit atau atas permintaan pihak yang berwenang menerima ganti kerugian atau kuasanya. Untuk informasi pribadi dikecualikan secara permanen <b>menjadi</b> Dikecualikan sampai laporan pekerjaan selesai diaudit atau atas permintaan pihak yang berwenang menerima ganti kerugian atau</p>	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	Usulan Baru Tahun 2025

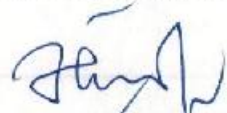
No	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Hasil Pengujian	Kewenangan OPD	Keterangan
		<p>kuasanya <b>Dan apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan alasan dan pertimbangan serta kesesuaian pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada prinsipnya dapat diterima.</li> </ul>		
5	Rekomendasi Teknis Keandalan Bangunan Gedung dan Prasarana Permukiman pada Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jangka waktu pengecualian <b>semula</b> Permanen, kecuali ada persetujuan tertulis dari Pemilik Pekerjaan dan Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng <b>menjadi Ada persetujuan tertulis dari Pemilik Pekerjaan dan Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng;</b></li> <li>- Berdasarkan alasan dan pertimbangan serta kesesuaian pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada prinsipnya dapat diterima</li> </ul>	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	Usulan Baru Tahun 2025
6	Data pengujian sampel pada laboratorium	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi dikecualikan lebih spesifik yaitu sampel apa yang dikecualikan;</li> <li>- Berdasarkan alasan dan pertimbangan disepakati yaitu : <b>Data pengujian sampel konstruksi pada laboratorium terakreditasi KAN.</b></li> </ul>	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	Usulan Baru Tahun 2025
7	Data/Informasi pribadi dalam Laporan Penanganan Benturan Kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada <b>DI BAWAH KEWENANGANNYA</b> kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;</li> </ul>	<b>Inspektorat Provinsi Jawa Tengah</b>	Usulan Baru Tahun 2025

No	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Hasil Pengujian	Kewenangan OPD	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Data/Informasi pribadi dalam Laporan Penanganan Benturan Kepentingan</b> merupakan kewenangan <b>Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;</b></li> <li>- <b>Dihapus</b> dari daftar informasi dikecualikan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya.</li> </ul>		
8	Data NIK dan NPWP Tenaga Kerja Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jangka waktu pengecualian <b>semula</b> Dikecualikan secara permanen. Hanya dibuka berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap <b>menjadi</b> Berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap Dan apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi;</li> <li>- Jenis informasi yang masih dalam kelompok informasi yang sama dapat disatukan;</li> <li>- Disatukan dengan no 9 <b>Nomor Registrasi dan Dokumen Sertifikat Kompetensi Kerja;</b></li> </ul>	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	Usulan Baru Tahun 2025
9	Nomor Registrasi dan Dokumen Sertifikat Kompetensi Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jangka waktu pengecualian <b>semula</b> Dikecualikan secara permanen. Hanya dibuka berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap <b>menjadi</b> Berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap Dan apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi;</li> <li>- Jenis informasi yang masih dalam kelompok informasi yang sama dapat disatukan;</li> <li>- Disatukan dengan no 8 <b>Data NIK dan NPWP Tenaga Kerja Konstruksi;</b></li> </ul>	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	Usulan Baru Tahun 2025

No	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Hasil Pengujian	Kewenangan OPD	Keterangan
10	Dokumen pertanggungjawaban keuangan yang belum diaudit	Berdasarkan alasan dan pertimbangan serta kesesuaian pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada prinsipnya dapat diterima	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	Usulan Baru Tahun 2025
11	Dokumen Pelaksanaan Anggaran : Rincian Anggaran Belanja (RAB)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Harus dibedakan antara DPA dan RAB;</li> <li>- Berdasarkan alasan dan pertimbangan disepakati yaitu : <b>Rincian Anggaran Belanja Dokumen Pelaksanaan Anggaran.</b></li> </ul>	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	Usulan Baru Tahun 2025
12	Dokumen/berkas Kepegawaian ASN meliputi : a. Arsip dokumen kepegawaian (riwayat pegawai dan keluarga, kesehatan); b. Identitas ASN yang melanggar atau dijatuhi hukuman disiplin dan sanksi etik; c. Daftar pegawai yang terkena kasus hukum;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis informasi yang masih dalam kelompok informasi yang sama dapat disatukan;</li> <li>- Disatukan dengan no 3 <b>Nomor rekening pegawai yang tercantum dalam daftar gaji pegawai;</b></li> <li>- <b>Dokumen/berkas Kepegawaian ASN</b> merupakan kewenangan <b>Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;</b></li> <li>- <b>Dihapus</b> dari daftar informasi dikecualikan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya.</li> </ul>	<b>Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah</b>	Usulan Baru Tahun 2025
13	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa meliputi Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Daftar Kuantitas dan Harga serta Dokumen Kontrak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Publik pasal 15 dokumen tahap pemilihan dan pelaksanaan termasuk informasi berkala;</li> <li>- Berdasarkan alasan dan pertimbangan disepakati yaitu : <b>Dokumen Pengadaan Barang/Jasa meliputi Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rincia Daftar Kuantitas dan Harga serta Rincian Dokumen Kontrak;</b></li> <li>- Harus dibedakan antara <b>Jangka Waktu dikecualikan</b> Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa dengan Dokumen Pengadaan Konstruksi;</li> </ul>	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	Usulan Baru Tahun 2025

No	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Hasil Pengujian	Kewenangan OPD	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan pekerjaan Konstruksi ditutup sampai dengan Final Hand Over (FHO), hanya dibuka berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap;</li> <li>- Pengadaan Barang dan jasa ditutup sampai dengan serah terima barang, hanya dibuka berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.</li> </ul>		

Mengetahui,  
Ketua PPID Pelaksana



ALI HUDA, ST, MT  
NIP. 19740221 199903 1 006

Surakarta, 07 Februari 2025  
Notulis



ARI MAWARDI, S.Kom  
NIP. 19860105 201012 1 005